

BAB II

RELASI RUSIA-UKRAINA DARI MASA KE MASA: RUS KYIV HINGGA FEDERASI RUSIA DAN OPERASI MILITER KHUSUS DI TAHUN 2022

Di bab ini, penulis akan menjelaskan relasi Rusia-Ukraina berdasarkan latar belakang historis mulai dari periode Rus Kyiv di abad ke-13 hingga Uni Soviet, lahirnya Federasi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, dan peristiwa terbaru yaitu operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina di tahun 2022. Poin-poin tersebut penting untuk dielaborasi dalam penulisan ini karena peristiwa operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina yang terjadi di tahun 2022 tidak terlepas dari hubungan kedua negara yang terbentuk berdasarkan latar belakang sejarah, geografis, kebudayaan, hingga konflik-konflik yang terjadi dari masa ke masa. Penulis akan membagi bab ini dalam tiga subbab, yaitu: relasi Rusia-Ukraina pada masa Rus Kyiv hingga Uni Soviet; relasi Rusia-Ukraina menjelang runtuhnya Uni Soviet hingga periode Rusia modern (Federasi Rusia); dan peristiwa operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina di tahun 2022.

Subbab pertama akan berisi penjelasan mengenai latar belakang sejarah kedua negara yang berawal dari negara Rus Kyiv pada abad ke-13, Imperium Rusia, hingga terbentuknya Uni Soviet. Pembahasan pada subbab ini akan banyak menekankan pada dinamika perubahan wilayah/teritori kedua negara dengan tujuan memberikan gambaran bagi pembaca bagaimana Rusia-Ukraina memiliki keterikatan suku, etnis, dan kebudayaan meskipun sekarang keduanya merupakan

negara independen dengan kedaulatannya masing-masing. Pada subbab kedua, penulis akan menjelaskan relasi Rusia-Ukraina menjelang dan pasca runtuhnya Uni Soviet dilihat dari periode kepemimpinan Boris Yeltsin dan Putin. Dibawah kepemimpinan Putin, mulai terlihat adanya tren yang terus memburuk dalam hubungan Rusia-Ukraina, mulai dari bagaimana Rusia menyikapi *Orange Revolution* yang terjadi di Ukraina tahun 2004, konflik di wilayah Ukraina Timur (Donbas), kebijakan kontroversial Rusia untuk menganeksasi Krimea di tahun 2014, hingga operasi militer khusus terbaru terhadap Ukraina yang terjadi di tahun 2022. Di subbab terakhir, penulis akan menjelaskan secara rinci kronologi operasi militer khusus mulai dari Putin yang menempatkan tentara-tentara Rusia di perbatasan Ukraina, tuntutan-tuntutan Putin pada AS dan NATO bila operasi militer khusus ingin diakhiri, hingga situasi stagnan yang terjadi saat ini dengan tentara-tentara Ukraina yang ternyata cukup menyulitkan Rusia.

2.1 Relasi Rusia-Ukraina Pada Masa Rus Kyiv, Imperium Rusia, hingga Uni Soviet

Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah menyoroti hubungan antara kedua negara terutama terkait kedaulatan teritori/wilayah. Amerika Serikat, negara-negara Barat, hingga organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa menyatakan bahwa tindakan Rusia adalah sebuah ‘operasi militer khusus’ yang melanggar kedaulatan Ukraina, sedangkan Putin menyebut kebijakannya tersebut sebagai sebuah ‘operasi militer’ yang bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang Rusia yang mengalami penyiksaan di Ukraina. Pada saat operasi militer khusus terjadi, Ukraina merupakan

negara yang merdeka dan berdaulat selama lebih dari 30 tahun dimana hal tersebut diakui oleh masyarakat internasional, termasuk Rusia. Namun demikian, masih terdapat sejumlah oknum maupun kelompok dari Rusia yang merasa bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia; bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu; bahwa orang-orang Rusia dan orang-orang Ukraina adalah “*one people, a single whole*” (Vladimir Putin, 2021). Keterikatan tersebut juga disebutkan Presiden Putin dalam pidatonya sebelum beliau memerintahkan operasi militer khusus dimana ia menyatakan bahwa “*Ukraine is not just a neighboring country for us. It is an inalienable part of our own history, culture and spiritual space...*” (Putin, 2022). Bagi Putin, Ukraina tidak hanya sebatas negara tetangga bagi Rusia, tetapi merupakan bagian dari sejarah dan kebudayaan Rusia. Dalam sub pembahasan ini, penulis akan menjelaskan relasi Rusia-Ukraina mulai dari masa berdirinya negara Rus Kyiv, Imperium Rusia, Perjanjian Pereyaslav 1754, hingga terbentuknya Uni Soviet.

Selama ribuan tahun, dataran berumput di Ukraina dan Rusia Selatan (Stepa Pontus-Kaspia) telah dihuni oleh beragam orang nomaden yang berkembang di sepanjang Sungai Don, Dnieper, dan Volga. Catatan tertulis pertama mengenai negeri ini berasal dari zaman klasik abad ke-7 SM. Selama periode tersebut, Stepa Pontus-Kaspian didominasi oleh berbagai suku asal Iran dimana yang paling menonjol adalah Skithia (*Scythians*) dan Sarmatia (*Sarmatians*). Selama berabad-abad, dominasi mereka di padang rumput nyaris tidak tertandingi, namun lebih jauh ke Utara, sebuah suku muda dan ambisius mulai menemukan pengaruhnya: suku Slavia (*Slavs*). Asal usul dari suku tersebut diselimuti banyak perdebatan dan

misteri. Catatan tertulis paling awal tentang keberadaan mereka berasal dari sumber-sumber Romawi. Pada abad pertama Masehi, Senator dan Sejarawan Tacitus menggambarkan sebuah suku yang disebutnya “*Venedae*”: orang-orang yang terutama tinggal di sepanjang sungai Vistula (Arifian, 2020). Tacitus mencatat bahwa mereka membangun rumah, membawa perisai, dan bertempur tanpa berkuda, yang membedakan mereka dari suku Sarmatia. Dianggap sebagai bangsa barbar lain oleh peradaban klasik, kaum *Venedae* banyak dianggap para sejarawan Eropa sebagai nenek moyang seluruh negara Slavia saat ini.

Selama berabad-abad, kaum Slavia dikepung oleh suku-suku lain yang kuat: Celtic dan Jerman di Barat, dan Skithia-Sarmatia di Selatan. Hal ini berubah antara abad ke-4 dan ke-6 ketika terjadi migrasi besar-besaran, dengan suku Hun dan berbagai bangsa Jerman bermigrasi ke perbatasan Kekaisaran Romawi yang runtuh. Secara umum, perpindahan migrasi yang sangat besar ini memungkinkan orang-orang Slavia untuk melakukan ekspansi ke luar tanah air asal mereka ke segala arah. Pada saat itu, bangsa *Venedae* telah menyebar ke banyak suku yang berbeda dan bercabang. Beberapa suku menyeberangi Sungai Donau ke wilayah Romawi Timur, merebut tanah di Balkan dan menjadi nenek moyang bangsa Slavia Selatan. Beberapa suku berkelana ke arah Barat menuju wilayah kekuasaan suku Avar. Di sana mereka membuat rumah untuk diri mereka sendiri dan akhirnya menjadi pendahulu Slavia Barat. Yang terpenting dan memiliki keterkaitan paling besar dalam penulisan ini adalah migrasi sejumlah suku yang pergi ke arah Timur menuju Ukraina modern. Bangsa Skithia dan Sarmatia yang selama berabad-abad mendominasi padang rumput, dilemahkan oleh peperangan selama berabad-abad

dengan bangsa Goth, Romawi, dan Hun. Orang-orang Slavia yang bermigrasi ke Timur kemudian menanamkan akar mereka di wilayah yang tidak stabil tersebut dan akhirnya berasimilasi dengan sisa-sisa terakhir masyarakat kuno ini. Dalam dekade-dekade berikutnya, suku Slavia akan terus berkembang di sebagian besar wilayah modern di Ukraina, Belarusia, dan Rusia barat-tengah, berasimilasi dan berkembang dengan berbagai suku Finno-Ugric dan Baltik, sepupu leluhur orang Lituania, Latvia, Estonia, dan Finlandia.

Seiring bergantinya peradaban yang diwarnai dengan ekspansi, peperangan, dan penaklukan dari berbagai suku di wilayah Skandinavia dan Eropa, pada abad ke-11 berdirilah negara Rus Kiev (862-1242). Baik asal usul negara Kiev maupun nama Rus, yang kemudian digunakan untuk menyebut negara tersebut, masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Menurut catatan tradisional yang disajikan dalam *The Russian Primary Chronicle*, kota ini didirikan oleh Oleg, penguasa Novgorod dari sekitar tahun 879 yang merupakan keturunan dari bangsa Skandinavia yang menjelajah ke Stepa Pontus-Kaspia. Pada tahun 882, Oleg menaklukkan kota Smolensk dan Liubich, serta kota terakhir Kiev yang kemudian menjadi ibu kota Kievan Rus karena lokasinya yang strategis di dekat Sungai Dnieper. Mengalahkan penguasa di wilayah-wilayah tersebut, Oleg mendeklarasikan dirinya sebagai Pangeran Kiev dan memutuskan bahwa dari titik itulah ia akan menciptakan pemerintahan baru. Pada tahun 885, Oleg telah menyatukan sebagian besar wilayah Slavia Timur di bawah pemerintahannya dan disinilah negara Rus Kiev terlahir dengan Kiev sebagai ibu kota besarnya, tempat keturunan Rurik dan Oleg memerintah sebagai Pangeran Dinasti Rurikid.

Memperluas kekuasaannya, Oleg menyatukan suku-suku lokal Slavia dan Finlandia, mengalahkan suku Khazar, dan pada tahun 911 berhasil mengatur perjanjian perdagangan dengan bangsa Romawi Kuno di Konstantinopel yang menciptakan kemakmuran perekonomian bagi bangsa barunya selama bertahun-tahun. Dinasti Rurikid pada akhirnya membentuk Kekaisaran Rusia yang kemudian diteruskan oleh Dinasti Romanov.

Setelah melewati zaman keemasannya selama berabad-abad sebagai salah satu negara Slav Timur dengan kemakmuran dan kekayaan yang luar biasa, pada abad ke-13 wilayah Rus Kiev yang sekarang ini merupakan wilayah Rusia dan Ukraina modern dioperasi militer khusus oleh bangsa Mongol (Gerombolan Emas) dimana bangsa tersebut memperoleh kemenangan besar dengan menaklukkan kota-kota besar di Rus Kiev seperti Ryazan, Kolomna, Moscow, Vladimir, dan ibu kota Kiev. Operasi militer khusus ini mengakibatkan jatuhnya Rus Kiev pada abad ke-13 dan mengubah sejarah Eropa Timur, termasuk pembagian orang-orang Slavia Timur menjadi tiga, yaitu Rusia (*Russians, The Great Russians*), Ukraina (*Ukrainians, Little Russians*), dan Belarus (*Byelorussians, Bielorusians, White Russians*).

Setelah hampir dua abad berada dibawah operasi militer khusus bangsa Mongol, Rusia berhasil mendapatkan kemerdekaan dibawah kepemimpinan Pangeran Agung Ivan III. Walaupun peradaban dengan sistem pemerintahan yang terstruktur di wilayah tersebut sudah terbentuk sejak berdirinya negara Rus Kiev (jauh sebelum Pangeran Agung Ivan III), para sejarawan menyepakati bahwa

Pangeran Agung Ivan III-lah yang merupakan sosok pendiri Kekaisaran Rusia dengan mendeklarasikan kemerdekaan Moskow pengaruh bangsa Mongol, menciptakan Sudebnik (hukum perdata) pada 1497, dan memerintahkan pembangunan bata merah Kremlin Moskow yang berdiri kokoh hingga kini (Manaev, *When Was Russia Founded?*, 2021). Adipati Agung Ivan III juga merupakan penguasa Moskow pertama yang menggunakan gelar "tsar" dalam korespondensi diplomatik. Gelar ini pernah digunakan oleh orang Rusia untuk "Khan" dari Golden Horde, sebuah gelar yang biasa digunakan oleh orang Mongol untuk penguasa berdaulat atau militer. (Manaev, *When Was Russia Founded?*, 2021).

Setelah periode dominasi bangsa Mongol, wilayah negara Rus Kiev yang sekarang merupakan wilayah Ukraina modern didominasi oleh *Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (The Polish-Lithuanian Commonwealth)* dimana bangsa tersebut meninggalkan banyak jejak dalam politik dan kehidupan masyarakat Ukraina. Di luar wilayah kekuasaan Persemakmuran Polandia-Lituania, terdapat wilayah liar yang merupakan daerah dari suku Cossack. Mereka merupakan orang-orang yang tidak ingin terikat sebuah rezim untuk bisa hidup sepenuhnya berdasarkan aturan independen mereka sendiri. Terjepit di antara kekuatan Polandia-Lithuania di Barat dan Rusia di Timur, suku Cossack mempertahankan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan tersebut hingga mereka tidak dapat lagi melakukan hal tersebut dan harus memilih salah satu untuk membentuk aliansi.

Pada tahun 1654, panglima perang Cossack Bohdan Khmelnytsky, memimpin pemberontakan melawan Polandia dan berusaha menciptakan negara merdeka bagi Cossack dan menandatangani perjanjian dengan Rusia. Para ahli telah memperdebatkan apa sebenarnya maksud dan makna perjanjian tersebut bagi keduanya, namun dengan perjanjian tersebut Ukraina mendapatkan perlindungan dari para Tsar dan juga janji Rusia untuk otonomi Ukraina. Alih-alih mendapatkan sekutu yang akan mempertahankan keberadaan mereka, para Cossack mendapati bahwa mereka kini memiliki kelompok atau penguasa baru. Pada tahun 1667, Polandia dan Rusia mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri untuk membagi tanah Ukraina yang diperebutkan. Pada akhirnya partisi tersebut tidak bertahan lama dengan jatuhnya salah satu mitra dan terpecahnya negara-negara besar lainnya. Bagi Ukraina, berakhirnya kekuasaan Persemakmuran Polandia-Lituania pada tahun 1795 menjadikan sebagian besar wilayah Ukraina berada dibawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, dengan satu pengecualian: provinsi Galisia (sekarang mencakup wilayah Ukraina Barat modern) berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria.

Di wilayah Ukraina Timur di bawah Kekaisaran Rusia, pemerintah Rusia berasumsi bahwa para suku Slavia yang tinggal di daerah tersebut pada akhirnya akan melebur dalam budaya Rusia. Permaisuri Rusia Catherine Yang Agung (Catherine The Great) memberi nama wilayah yang ia taklukkan di dekat Laut Hitam sebagai "*Novorossiya*" yang berarti "Rusia Baru" yang menyiratkan ambisinya atas identitas Kekaisaran Rusia di masa depan yang bersatu dan diperluas. Disana, pemerintah Rusia mengusahakan berbagai cara untuk mencegah

perkembangan identitas dan nasionalisme orang-orang Ukraina; mereka melarang bahasa Ukraina digunakan di berbagai lapisan masyarakat dan membatasi literatur-literatur yang diperkenankan dalam edukasi. Namun sebaliknya, di bagian paling barat Ukraina yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria, orang-orang Ukraina mampu mengembangkan identitas nasional, sastra, dan budaya modern yang masih mengizinkan bahasa Ukraina. Pemisahan antara Ukraina Timur dan Ukraina Barat ini menimbulkan kontras dalam sejarah Ukraina dimana sentimen nasionalis lebih kuat pada masyarakat yang tinggal di Ukraina Barat dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di Ukraina Timur. Menurut ilmuwan politik Rusia Gulnaz Sharafutdinova, masyarakat Ukraina Barat dan Timur mengembangkan orientasi geopolitik yang berbeda, memiliki interpretasi berbeda terhadap ingatan sejarah mereka, dan bahkan jajaran pahlawan yang berbeda. Perpecahan identitas inilah yang menjadi akar atas banyak permasalahan Ukraina modern.

Revolusi Rusia tahun 1917 adalah salah satu peristiwa politik paling besar di abad ke-20. Ketika Kekaisaran Rusia terjerumus ke dalam perang saudara, Ukraina adalah salah satu dari beberapa negara, bersama dengan Finlandia, Polandia, dan negara-negara Baltik, yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Rusia. Revolusi yang penuh kekerasan tersebut menandai berakhirnya Dinasti Romanov dan kekuasaan Kekaisaran Rusia selama berabad-abad. Antara tahun 1890 hingga 1910, populasi kota-kota besar Rusia seperti St. Petersburg dan Moscow meningkat hampir dua kali lipat dan mengakibatkan melejitnya kepadatan penduduk. Ledakan populasi tersebut ditambah dengan musim tanam yang sulit karena kondisi iklim Rusia serta serangkaian peperangan yang memakan banyak

korban jiwa (mulai dari Perang Krimea hingga Perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905) menyebabkan terjadinya krisis pangan berkelanjutan di seluruh penjuru Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1891-1892, diperkirakan terdapat sekitar 400.000 orang Rusia yang tewas akibat krisis pangan tersebut. Serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi menyebabkan kekecewaan besar warga negara Rusia terhadap Czar Nicholas II dan tak lama kemudian terjadi protes besar-besaran yang dilakukan para kaum buruh terhadap pemerintah. Peristiwa tersebut merupakan awal dari insiden *Bloody Sunday* tahun 1905 dimana ratusan demonstran tak bersenjata dibunuh oleh pasukan Tsar. Pembantaian tersebut kemudian memicu terjadinya revolusi pertama yaitu Revolusi Rusia tahun 1905 dimana para buruh memberontak dengan melakukan serangkaian pemogokan kerja yang melumpuhkan seluruh negeri.

Setelah pertumpahan darah tahun 1905 dan kekalahan memalukan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Nicholas II menjanjikan kebebasan berpendapat yang lebih besar serta pembentukan majelis perwakilan, yang kemudian dinamakan 'Duma', untuk mengupayakan reformasi. Rusia memasuki Perang Dunia I pada bulan Agustus 1914 untuk mendukung Serbia dan sekutu mereka Perancis dan Inggris. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam perang justru terbukti menjadi bencana bagi Kekaisaran Rusia. Dari kekuatan militer, Rusia bukanlah tandingan Jerman yang merupakan negara industri maju, dan korban jiwa di Rusia lebih besar dibandingkan negara mana pun dalam perang sebelumnya. Kekurangan pangan dan bahan bakar melanda Rusia seiring dengan meningkatnya inflasi. Perekonomian yang sudah lemah kini terganggu oleh upaya perang yang memakan

banyak biaya. Pada tahun 1916, sebagian besar rakyat Rusia sudah kehilangan kepercayaan terhadap kegagalan kepemimpinan Tsar. Korupsi di pemerintahan merajalela, perekonomian Rusia masih terbelakang dan Nicholas berulang kali membubarkan Duma ketika parlemen tersebut menentang keinginannya. Dengan demikian, terjadilah revolusi kedua di Rusia yang pada akhirnya akan membawa Kekaisaran Rusia pada keruntuhannya untuk kemudian digantikan dengan Uni Soviet.

Revolusi Rusia tahun 1917 dimulai pada tanggal 8 Maret 1917. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Petrograd bersama dengan kerumunan besar pekerja industri yang melakukan pemogokan. Pada tanggal 11 Maret, pasukan Garnisun Tentara Petrograd dipanggil untuk menumpas pemberontakan, tetapi tidak berhasil. Untuk mengatasi situasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk pemerintahan sementara pada 12 Maret. Namun, pemerintahan sementara yang baru dibentuk tidak mampu mengendalikan serangkaian protes, dan Tsar Nicholas turun tahta beberapa hari kemudian, mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov selama berabad-abad di Kekaisaran Rusia. Pada tanggal 6-7 November 1917, kaum revolusioner sayap kiri yang dipimpin oleh Vladimir Lenin (pemimpin Partai Bolshevik) melancarkan kudeta terhadap Pemerintahan Sementara Duma. Selama Revolusi Rusia, kaum Bolshevik, yang dipimpin oleh revolusioner sayap kiri Vladimir Lenin, merebut kekuasaan dan menghancurkan tradisi pemerintahan Tsar.

Kaum Bolshevik kemudian menjadi pendiri Partai Komunis Uni Soviet. Para sejarawan Tsar dan Soviet menganggap bahwa orang-orang Rusia dan Ukraina berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu suku Slavia Timur dimana menurut Rotaru (2018), hal tersebut dimaksudkan untuk menolak narasi adanya identitas Ukraina yang terpisah dari Rusia. Menurut Kuzio (2022), pendekatan historis tersebut terus dianut oleh Putin yang mempercayai bahwa Ukraina memiliki sejarah yang sama dengan Rusia, bahasa Rusia yang sama, dan Gereja Ortodoks Rusia yang sama. Menurut Putin dan para sejarawan Soviet, sejarah bersama Rusia-Ukraina adalah inti dari identitas suku Slavia Timur, begitu pula sejarah bersama Rusia-Belarusia.

Namun demikian, alur historis yang diklaim Putin dan para sejarawan Soviet sangatlah berbeda dengan alur sejarah yang diyakini masyarakat Ukraina dan komunitas internasional secara keseluruhan: bahwa pernah terdapat wilayah Ukraina yang tidak jatuh dalam rezim Kekaisaran Rusia yang berkembang bersamaan dengan budaya Barat (Persemakmuran Polandia-Lithuania); bahwa Ortodoksi di Ukraina sangat erat hubungannya dengan Konstantinopel dan bukan Gereja Ortodoks Rusia; dan bahwa Ukraina tidak pernah bersifat xenofobis terhadap Barat (Kuzio, 2022). Putin tidak dapat menerima mitos sejarah Rusia abad ke-19 tentang bagaimana Kekaisaran Tsar dan Uni Soviet menindas identitas nasional beserta bahasa Ukraina karena hal-hal tersebut tidak sesuai dengan narasi yang digaungkannya tentang hubungan 'persaudaraan' antara Rusia dan Ukraina sejak dahulu kala. Putin menolak untuk mengakui adanya pengaruh Barat (dari Persemakmuran Polandia-Lithuania) di Ukraina bagian Barat, tetapi di saat yang

bersamaan tidak mengakui pelarangan bahasa dan budaya Ukraina oleh Tsar Rusia sambil mengabaikan Rusifikasi oleh rezim Soviet (Kuzio, 2022).

2.2 Relasi Rusia-Ukraina Menjelang Runtuhnya Uni Soviet Hingga Periode Rusia Modern (Federasi Rusia)

2.2.1 Menjelang Runtuhnya Uni Soviet

Pada bulan Desember 1991, Uni Soviet (USSR) mengalami keruntuhan dan menyebabkan terlahirnya 15 negara baru di kawasan Eropa Timur dengan kemerdekaan penuh pada 26 Desember 1991. Di tengah krisis politik-ekonomi yang dahsyat akibat kebijakan *Perestroika* milik Mikhail Gorbachev dan dengan beberapa negara anggota republik yang telah menyatakan keengganannya untuk terus tergabung dalam Uni Soviet (termasuk Ukraina), petinggi-petinggi Uni Soviet akhirnya menerima bahwa disintegrasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari (Klein, 2019). Bagi para negara republik anggota, integrasi dalam Uni Soviet penting untuk dipertahankan demi kelangsungan perekonomian, yaitu subsidi dari pusat dalam bentuk aliran dana dan harga-harga yang rendah (Sagramoso, 2020). Ketika pada bulan November 1991 Gorbachev dan para pemimpin RSFSR mencetuskan reformasi ekonomi yang memperkenalkan sistem *market economy*, tidak ada satu pun negara republik anggota lainnya yang mengikuti ataupun mengadopsi kebijakan tersebut. Bahkan, dibentuknya kebijakan tersebut mengakibatkan krisis ekonomi yang luar biasa dahsyat di Uni Soviet dan menyebabkan banyak negara republik anggota lain yang ingin memisahkan diri dari

Uni Soviet (Sagramoso, 2020). Momentum tersebut diperparah dengan sikap Ukraina yang membatasi keterlibatannya dalam pembentukan kebijakan ekonomi, keputusan untuk membentuk tentara militernya sendiri, hingga keputusan untuk melaksanakan referendum untuk menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet.

Bagaimanapun juga, Rusia menganggap Ukraina sebagai “*its own blood sister*” dan sangatlah sulit bagi Rusia untuk membayangkan eksistensi Uni Soviet tanpa Ukraina (Solchanyk, 1996). Atas dasar itulah Yeltsin dan para petinggi Uni Soviet berusaha untuk terus mempersuasi negara-negara republik anggota untuk tidak memisahkan diri. Dua hari setelah Ukraina melaksanakan referendum kemerdekaan pada 24 Agustus 1991, Yeltsin menyatakan bahwa “bila Krimea, Donbas, dan Kazakhstan pergi, maka Rusia harus melindungi populasi yang berada disana dan tidak melupakan bahwa dulunya wilayah tersebut dihuni oleh orang-orang Rusia” (Solchanyk, 1996). Gavriil Popov (walikota Moscow pada saat itu yang juga merupakan salah seorang paling berpengaruh bagi Yeltsin) juga menyatakan kesetujuannya dengan Yeltsin dengan mengatakan bahwa proklamasi-proklamasi kemerdekaan yang terjadi adalah ilegal dan menuntut adanya negosiasi ulang dengan negara-negara republik anggota yang memisahkan diri (Solchanyk, 1996).

Mempertimbangkan krisis yang tengah terjadi, pada tanggal 8 Desember 1991, Boris Yeltsin dan Gennady Burbulis (RSFSR), Leonid Kravchuk dan Vitold Fokin (Ukraina), serta Stanislav Shushkevich dan Vyacheslav Kebich (Republik Belarusia) berkumpul di Minsk untuk membahas masa depan Uni Soviet. Solchanyk (1996) menyebutkan bahwa Yeltsin diutus Gorbachev untuk

menyampaikan pesan bahwa beliau bersedia untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi untuk menyelamatkan Uni Soviet asalkan Ukraina bersedia untuk menandatangani perjanjian yang dihasilkan. Namun demikian, Kravchuk menolak untuk menandatangani perjanjian apapun yang masih melibatkan Ukraina dibawah payung Uni Soviet dan pada akhirnya terciptalah perjanjian *Belovezhskii* atau *Belovezha Accords* yang mengakhiri eksistensi *Union of Soviet Socialist Republics* (USSR) dan digantikan dengan terbentuknya *Commonwealth of Independent States* (CIS) atau *Sodruzhestvo Nezavisimyykh Gosudarstv* (Melville & Shackleina, 2005). *Commonwealth of Independent States* (CIS) merupakan sebuah organisasi persemakmuran yang bertujuan untuk membentuk relasi baru antar negara-negara bekas Uni Soviet yang didasarkan pada pengakuan terhadap kedaulatan nasional, kesetaraan, dan prinsip non-intervensi dalam urusan-urusan internal (Melville & Shackleina, 2005). Kravchuk mengatakan bahwa Rusia dan Belarus menginginkan solusi yang bisa mewedahi hubungan lebih dekat antar ketiganya dan antar negara-negara republik anggota lainnya, tetapi sikap Ukraina-lah yang pada akhirnya mengarahkan pada terbentuknya persemakmuran tersebut (Solchanyk, 1996).

Walaupun Ukraina berperan sebagai salah satu negara pendiri CIS, Ukraina tidak meratifikasi atau menandatangani *Commonwealth of Independent States Charter* dan alhasil tidak pernah menjadi anggota resmi CIS. Hal tersebut dinyatakan secara resmi oleh Majelis Tertinggi Ukraina (*Verkhovna Rada*) pada tahun 1992 bahwa “Ukraina tidak menerima transformasi *Commonwealth of Independent States* menjadi entitas negara dengan otoritas dan administrasinya sendiri” (Pernyataan dari Majelis Tertinggi Ukraina *Verkhovna Rada* tahun 1992,

Artikel 180, No. 2) dan bahwa “Ukraina menolak memberikan *Commonwealth of Independent States* status sebagai subyek hukum internasional” (Pernyataan dari Majelis Tertinggi Ukraina *Verkhovna Rada* tahun 1992, Artikel 180, No. 3). Meskipun demikian, Ukraina tetap berpartisipasi dalam beberapa perjanjian dibawah naungan CIS seperti Kawasan Perdagangan Bebas Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CISFTA), Perjanjian Kerja Sama di Bidang Ekologi dan Perlindungan Lingkungan, Konvensi Bantuan Hukum dan Hubungan Hukum dalam Masalah Perdata, Keluarga dan Pidana, dan lain sebagainya (Lashchenko, 2020).

Berdasarkan perbedaan sikap dari Rusia dan Ukraina, dapat dilihat adanya perbedaan pandangan dari kedua negara terhadap alasan dan tujuan dibentuknya CIS: Ukraina melihat CIS sebagai sebuah cara untuk melepaskan diri dari Uni Soviet menjadi negara yang independen, sedangkan Rusia melihat CIS sebagai alternatif untuk tetap mempertahankan integrasi politik, ekonomi, dan militer antar negara-negara bekas Uni Soviet; Ukraina melihat CIS sebagai metode ‘*divorce*’, sedangkan Rusia melihat CIS ingin melekatkan seluruh negara bekas Uni Soviet melalui organisasi tersebut dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin (Ham, 1994). Bagi Ukraina, keterikatan dengan CIS hanya akan mengganggu dan membatasi kemerdekaan yang baru diperolehnya (Solchanyk, 1996). Maka dari itulah pada akhirnya Ukraina memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian CIS yang menetapkan Ukraina menjadi anggota tetap persemakmuran tersebut. Terkait keterlibatan Ukraina dalam beberapa perjanjian dibawah naungan CIS, Solchanyk (1996) menilai hal tersebut sebagai pendekatan pragmatis yang ditempuh Kravchuk

dalam menghadapi kesulitan-kesulitan perekonomian di awal kemerdekaan Ukraina.

2.2.2 Relasi Rusia-Ukraina Dibawah Kepemimpinan Boris Yeltsin (1992-1999) dan Putin (2000-sekarang)

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina menjadi pemegang senjata nuklir terbesar ketiga. Meskipun memiliki hulu ledak dan kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak, perangkat lunak yang mengendalikannya berada di bawah kendali Rusia. Pada tahun 1991, Boris Yeltsin terpilih menjadi presiden pertama Federasi Rusia. Sebagai presiden pertama setelah runtuhnya Uni Soviet, orientasi politik luar negeri Rusia dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin menunjukkan ciri-ciri yang pro-Barat dan mendukung liberalisasi politik luar negeri dimana Yeltsin mengusahakan cara-cara untuk memperbaiki relasi Rusia dengan Amerika Serikat (Sagramoso, 2020). Presiden Yeltsin dan Menteri Luar Negeri Andrei Kozyrev berulang kali menyatakan bahwa tujuan utama Rusia adalah reintegrasi ke Eropa dan “*civilized international community*” dimana mereka mempercayai bahwa menjaga relasi baik dengan negara-negara Barat merupakan sebuah hal yang penting untuk mendorong demokratisasi dan liberalisasi (Kozhemiakin, 1997). Pada Washington Summit di tahun 1992, Yeltsin mendeklarasikan tujuan-tujuan politik luar negeri Rusia yang meliputi desentralisasi negara-negara bekas Uni Soviet dengan memberi mereka kebebasan dan hak-hak otonomi, mengurangi intensitas dan keterlibatan Rusia dalam operasi-operasi militer regional, memperdalam kerja sama dalam PBB sebagai Dewan

Keamanan, memperluas intergasi dalam institusi-institusi perekonomian global, dan kerja sama dengan NATO (Boris Yeltsin, *"The Great Speeches"*, Washington, D.C., 1992).

Untuk mendekatkan relasi Rusia dengan Amerika dan negara-negara Barat, Yeltsin dan Kozyrev menjalin kerja sama-kerja sama bilateral dan kunjungan-kunjungan, menempuh kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari Barat, menerima PBB sebagai instrumen dan mediator dalam menjaga perdamaian dunia, hingga menunjukkan keinginan untuk mendukung sanksi-sanksi dari PBB bahkan untuk melakukan intervensi militer bila diperlukan (Larrabee & Karasik, 1997). Di tahun 1991, Yeltsin mengumumkan deklarasi kerja sama dengan Inggris yang dinamakan *"Partnership for the 1990s"* dan menjalin berbagai kerja sama bilateral dengan Jerman, Prancis, dan Italia. Di tahun 1993, Yeltsin dan Bush menandatangani perjanjian START II untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir menjadi sekitar sepertiga dari jumlah yang masing-masing negara miliki pada saat itu. Di tahun yang sama, Yeltsin mendorong kerja sama dengan AS, negara-negara G7, dan IMF terkait kerja sama perekonomian dimana usaha tersebut menghasilkan keputusan AS, negara-negara G7, dan IMF untuk memberikan berbagai bantuan ekonomi beserta keringanan hutang. Dalam Perang Kosovo di tahun 1999, Yeltsin juga memutuskan untuk mendukung pemberian sanksi-sanksi ekonomi PBB pada Serbia atas aksi-aksi militernya di Yugoslavia (Gagnon, 1993).

Meskipun dilantiknya Yevgeny Primakov sebagai Menteri Luar Negeri pengganti Andrei Kozyrev di tahun 1996 mengindikasikan adanya sejumlah perubahan orientasi luar negeri Rusia karena pandangan Primakov yang anti-Barat, kebijakan-kebijakan luar negeri Rusia saat Primakov menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tetap relatif seimbang dimana Primakov juga memperkuat relasi dengan Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah untuk mengimbangi kedekatan Rusia dengan AS pada saat itu (Larrabee & Karasik, 1997). Orientasi Yeltsin dalam menyetir politik luar negeri Rusia banyak mendapat kecaman dari berbagai pejabat-pejabat politik anti-Barat di Rusia pada saat itu; mereka berpendapat bahwa Yeltsin dan kabinetnya merupakan sekelompok “*Westernphile liberals*” dimana mereka telah menjadikan Rusia bergantung secara politik, ekonomi, dan ideologi terhadap Barat (Sotirović, 2022).

Dalam mengelola hubungan dengan negara-negara bekas Uni Soviet, Yeltsin mengutarakan dalam *Foreign Policy Conception of the Russian Federation* tahun 1993 bahwa salah satu prioritas utama Rusia adalah untuk membangun hubungan yang baik, setara, dan saling menguntungkan dengan negara-negara *Commonwealth of Independent States* (CIS) dimana Ukraina menjadi salah satu negara pendirinya bersama dengan Rusia dan Belarusia (Melville & Shackleina, 2005). Dalam implementasinya, *Commonwealth of Independent States* diharapkan dapat berperan sebagai instrumen untuk mempromosikan kerja sama perekonomian, keamanan, dan kebijakan luar negeri antar anggotanya. Yeltsin dan Kozyrev meyakini bahwa untuk membina hubungan baik dan berkelanjutan dengan

negara-negara bekas Soviet, diperlukan metode non-koersif yang sifatnya sukarela untuk efisiensi dan keberlanjutan persemakmuran tersebut (Sagramoso, 2020).

Orientasi politik luar negeri Rusia dibawah Putin menunjukkan arah yang berbeda dibandingkan dengan orientasi politik luar negeri dibawah Yeltsin. Ketika Yeltsin dan pejabat-pejabat dalam administrasinya menunjukkan orientasi yang pro-Barat, orientasi politik luar negeri Rusia dibawah Putin menunjukkan arah yang bersifat konfrontatif, asertif, dan agresif dimana kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya dicirikan dengan ketidakpercayaan dan antagonisme terhadap Barat (Baldoni, 2016). Beberapa contoh kebijakan luar negeri Putin yang mengundang kontroversi dengan Barat dan komunitas internasional antara lain: *cyber war* dan kampanye propaganda di negara-negara Baltik, aneksasi Krimea di tahun 2014, intervensi militer di Suriah tahun 2015, dan operasi militer khusus terhadap Ukraina tahun 2022. Adanya perbedaan orientasi politik luar negeri Rusia dibawah dua kepemimpinan presiden yang berbeda menunjukkan adanya ciri kepemimpinan Putin tersendiri yang dapat mempengaruhi orientasi politik luar negeri Rusia, begitu pula halnya dengan Yeltsin.

Setelah Putin membenahi rezim domestik Rusia menjadi lebih “kondusif”, dapat diamati bagaimana Putin mulai mengarahkan orientasi politik luar negeri Rusia untuk mencapai tiga obyektf utama: mengembalikan status Rusia sebagai *global great power*; menciptakan tatanan dunia baru dimana Rusia bisa setara dengan Amerika Serikat dalam memberikan pengaruh di lingkup global; dan mendapatkan kembali dominasi atas negara-negara bekas Uni Soviet dengan

metode-metode yang mencerminkan ketidakpercayaan dan antagonisme terhadap Barat (Baldoni, 2016; Roberts, 2017; Lo, 2018; Bugayova, 2019; Trenin, 2019). Ketika Putin menduduki kursi kepresidenan di tahun 2000, beliau langsung menindaklanjuti para kaum-kaum separatistis di Chechnya atas kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya “insiden Yugoslavia kedua” dimana AS dan NATO mendukung kaum separatistis melalui intervensi militer (Gevorkyan, Timakova, & Kolesnikov, 2017). Putin khawatir bahwa bila hal itu terjadi, maka serangan-serangan bom dan rudal akan langsung menuju ke jantung negara.

Menurut Bugayova (2019), narasi utama yang menggiring Putin dalam menentukan orientasi politik luar negeri Rusia pada masa ini adalah ide bahwa “Rusia harus berperang untuk bertahan”. Putin mempercayai bahwa AS akan memberikan bantuan bagi para pemberontak di Chechnya untuk mengacaukan Rusia; bila intensitas operasi militer di Chechnya diturunkan, maka hal ini akan berisiko terjadinya disintegrasi dan hilangnya wilayah teritorial (Bugayova, 2019). Retorika tersebut juga bisa dikaitkan dengan bagaimana Rusia mengalami keterpurukan yang begitu besar pasca runtuhnya Uni Soviet: ketika Rusia tidak bisa melindungi dirinya dari kekuatan-kekuatan eksternal, secara khusus Amerika Serikat, maka hal tersebut dapat berujung pada disintegrasi dan hilangnya kedaulatan negara (Roberts, 2017).

Di tahun 2003-2004, dengan kondisi ekonomi-politik domestik Rusia sudah semakin membaik, dapat diamati bahwa Putin lebih berani untuk bersikap proaktif dan asertif dalam metode-metodenya untuk mencapai visinya walaupun dalam

praktiknya Putin juga tetap bersikap pragmatis (Roberts, 2017). Bersama Belarus dan Kazakhstan, Rusia menginisiasi terbentuknya Eurasian Economic Union (EAEU) di tahun 2014 dimana organisasi ini mewadahi perjanjian perdagangan bebas bagi negara-negara bekas Uni Soviet untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga-warga negaranya (Yeliseyeu, 2019). Di tahun 2003, Ukraina menyepakati untuk bergabung dalam EAEU sebelum akhirnya dibawah Presiden Victor Yushchenko, seorang pro-Barat, Ukraina membatasi diri dari keseluruhan proses rekrutmen dan pada akhirnya tidak jadi bergabung dalam EAEU. Situasi yang sama terjadi dengan Georgia dimana Presiden Eduard Shevardnadze, yang pernah menjabat sebagai Kementerian Urusan Luar Negeri Uni Soviet, memilih untuk menempuh kebijakan yang lebih independen dan justru menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam NATO (NATO, 2002). Pada November 2003, terjadi "*Rose Revolution*" di Georgia yang diakhiri dengan pengunduran diri Shevardnadze dari jabatannya sebagai Presiden. Di Ukraina, "*Orange Revolution*" terjadi di tahun 2004 atas ketidakpuasan rakyat pada proses pemilu yang dilandasi korupsi besar-besaran dan kecurangan dari pemerintah (Stebelsky, Makuch, & Hajda, 2023). Kedua revolusi tersebut dikenal sebagai "*color revolution*" yang diyakini Putin sebagai intensi AS dan NATO untuk melakukan ekspansi ke Timur dengan menempuh metode-metode destabilisasi terselubung dan Rusia harus melakukan cara apapun untuk mencegah hal tersebut terjadi di Rusia (Bugayova, 2019).

Mulai tahun 2004, orientasi politik luar negeri Rusia dibawah Putin mencerminkan antagonisme dan sikap konfrontatif terhadap Barat dimana Putin

mulai secara terbuka menyebarkan narasi Amerika Serikat dan NATO yang mengancam kedaulatan Rusia dengan melakukan ekspansi militer ke berbagai forum nasional maupun internasional. Di saat yang bersamaan, Putin juga terus mengencangkan perluasan Eurasian Economic Union (EAEU) untuk mencapai visinya mengintegrasikan negara-negara bekas Uni Soviet. Pada Konferensi Keamanan Internasional di München tahun 2007, Putin menyatakan bahwa “proses ekspansi NATO tidak ada korelasinya dengan modernisasi dari aliansi tersebut” dan bahwa “Amerika Serikat telah melangkahi batas-batas nasionalnya dalam segala hal” (President of Russia, 2007).

Mengikuti integrasi Estonia, Latvia, dan Lithuania ke NATO di tahun 2004, Rusia melaksanakan serangkaian kampanye propaganda di negara-negara tersebut melalui stasiun-stasiun TV dan radio untuk membangkitkan sentimen-sentimen negatif terhadap Barat serta anti-demokrasi, sekaligus mengembalikan kepercayaan warga terhadap Rusia (Kuzio, *Why Vladimir Putin is Angry with the West: Understanding the Drivers of Russia's Information, Cyber and Hybrid War*, 2017). Di tahun 2007, Rusia memprakarsai serangan siber besar-besaran (*cyber attack*) di Estonia yang menargetkan jaringan komputer, bank, dan media massa atas keputusan pemerintah Estonia untuk memindahkan monumen *Bronze Soldier* dari pusat pemakaman militer di Tallinn ke pinggiran kota (BBC, 2017). Hal yang serupa juga terjadi di Georgia pada tahun 2008 dimana peretas-peretas Rusia melakukan serangan-serangan DDOS (*Distributed Denial of Services*) yang bertujuan untuk kepentingan propaganda dan menolak/mengganggu komunikasi intelijen militer Georgia (Hollis, 2011). Enam tahun kemudian di Ukraina (2014),

Rusia tidak hanya melakukan serangan-serangan siber, tetapi juga memberikan dukungan pada kelompok-kelompok pemberontak lokal untuk menyetir kerusuhan domestik (Kuzio, *Why Vladimir Putin is Angry with the West: Understanding the Drivers of Russia's Information, Cyber and Hybrid War*, 2017).

Sementara mengencarkan propaganda dan disinformasi, Putin juga tetap mendorong perluasan Eurasian Economic Union (EAEU) sebagai salah satu metodenya untuk mengintegrasikan kembali negara-negara bekas Uni Soviet. Dari yang awalnya hanya beranggotakan Rusia, Belarus, dan Kazakhstan, Putin berhasil menggandeng Kyrgyzstan dan Armenia ke EAEU di tahun 2013 dan 2015 (Putz, 2015). Puncak sikap konfrontatif Putin dalam menyetir politik luar negeri Rusia adalah kebijakannya untuk mengintervensi Krimea (Ukraina) di tahun 2014 dan Suriah di tahun 2015. Obyektif Putin tetaplah sama dan konsisten: mengembalikan status Rusia sebagai *global great power*; menciptakan tatanan dunia baru dimana Rusia bisa setara dengan Amerika Serikat dalam memberikan pengaruh di lingkup global; dan mendapatkan kembali dominasi atas negara-negara bekas Uni Soviet (Bugayova, 2020).

Pada tahun 1994, Presiden Boris Yeltsin (Rusia) bersama dengan Presiden Leonid Kuchma (Ukraina) dan Presiden Bill Clinton (Amerika Serikat) menandatangani perjanjian *Budapest Memorandum on Security Assurances* dimana berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut Ukraina menyetujui untuk memberikan seluruh peledak nuklir yang tersisa di negaranya ke Rusia untuk dinonaktifkan. Dengan tidak memiliki persenjataan nuklir lagi, Ukraina secara resmi diakui sebagai '*non-nuclear state*' dalam perjanjian *Nuclear Non-proliferation Treaty*

(NPT). Sebagai imbalan atas penyerahan persenjataan nuklirnya, Rusia, Amerika Serikat, beserta seluruh penandatanganan perjanjian harus mengakui kemerdekaan, kedaulatan, dan wilayah perbatasan Ukraina. Dalam perjanjian tersebut, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menyetujui bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengancam kemerdekaan maupun kedaulatan Ukraina (*The Budapest Memorandum*, 1994). Ketiga negara tersebut juga menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan paksaan-paksaan ekonomi untuk memanfaatkan Ukraina demi kepentingan mereka sendiri dan tidak akan menjadikan wilayah satu sama lain sebagai obyek pendudukan militer yang melanggar hukum internasional (*The Budapest Memorandum*, 1994).

Pada tanggal 31 Desember 1999, Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden dan menobatkan Putin sebagai pengganti dirinya. Dibawah kepemimpinan Putin-lah mulai terlihat adanya tren yang terus memburuk antara Rusia-Ukraina; mulai dari bagaimana Rusia menyikapi *Orange Revolution* yang terjadi di Ukraina tahun 2004, konflik di wilayah Ukraina Timur (Donbas), kebijakan kontroversial Rusia untuk menganeksasi Krimea di tahun 2014, hingga operasi militer khusus terbaru terhadap Ukraina yang terjadi di tahun 2022. Pada tahun 2004, "*Orange Revolution*" terjadi dikarenakan ketidakpuasan rakyat pada proses pemilu antara Viktor Yushchenko dan Viktor Yanukovych (kandidat yang didukung Putin) yang diyakini masyarakat dilandasi korupsi besar-besaran dan secara sengaja dicurangi pemerintah untuk memenangkan Yanukovych (Stebelsky, Makuch, & Hajda, 2023). Kyiv, ibukota Ukraina, adalah titik fokus kampanye gerakan perlawanan sipil dengan ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi setiap hari.

Secara nasional, revolusi disoroti oleh serangkaian tindakan pembangkangan sipil, aksi duduk, dan pemogokan umum (Pifer & Thoburn, 2013). Namun, Yushchenko segera menemukan dirinya dilanda pertikaian dan tidak dapat memimpin Ukraina secara meyakinkan menuju integrasi Euro-Atlantik selama masa jabatannya. Kenyataan tersebut banyak menghilangkan kepercayaan masyarakat Ukraina terhadapnya dan alhasil membuka jalan bagi Viktor Yanukovych untuk menyerobot kursi kepresidenan di tahun 2010.

The Orange Revolution berdampak besar pada cara masyarakat Ukraina memandang identitas nasional mereka. Selama tiga belas tahun pertama setelah memproklamasikan kemerdekaannya, batas-batas politik, budaya, sosial, dan ekonomi antara Rusia dan Ukraina masih tidak dapat dibedakan dengan jelas. Berawal dari satu negara besar yang sama, Ukraina memiliki jumlah populasi beretnis Rusia terbesar diantara negara-negara bekas Soviet lainnya. Merupakan suatu kejajaran bila masyarakat dari kedua negara masih merasa bahwa mereka memiliki keterikatan satu sama lain baik secara psikologis maupun kebudayaan (Leichtova, 2014). Namun demikian, peristiwa *Orange Revolution* mengubah sentimen tersebut secara drastis dimana warga negara Ukraina mulai membangkitkan keinginan untuk memiliki identitas nasionalnya sendiri yang terlepas dari otoritarianisme Rusia dan Putin (Dickinson, 2020). Dalam enam belas tahun sejak peristiwa *Orange Revolution*, Ukraina telah menggelar delapan pemilihan umum tanpa pernah menyaksikan adanya penyelewengan maupun kecurangan pemerintah dalam penghitungan suara yang pada saat itu masih banyak terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet lain (Fraser, 2008).

Bagi Rusia, peristiwa *Orange Revolution* berimplikasi terhadap cara Putin menyetir politik luar negeri Rusia yang tercermin dari perubahan haluan yang signifikan dalam orientasi politik luar negerinya. Revolusi yang terjadi di Ukraina (*Orange Revolution*) dan Georgia (*Rose Revolution*) diyakini Putin sebagai metode Amerika Serikat dan NATO untuk melakukan ekspansi ke Timur dengan menempuh metode-metode destabilisasi terselubung (Bugayova, 2019). Berangkat dari keyakinan tersebut, Putin memastikan bahwa demonstrasi-demonstrasi tersebut tidak menular di wilayah-wilayah lain yang dapat mempengaruhi stabilisasi Rusia. Salah satu hal pertama yang dilakukan Putin adalah terkait bidang informasi dimana Rusia meluncurkan saluran televisi Russia Today dalam beberapa bulan setelah pecahnya *Orange Revolution* untuk membentengi narasi-narasi provokatif Barat dengan narasi anti-Barat miliknya (Dickinson, 2020). Dalam waktu yang hampir bersamaan, Putin mulai mengidentifikasi aktor-aktor yang berpotensi memercik pemberontakan, mulai dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat, hingga organisasi-organisasi non-profit yang memiliki relasi dengan Rusia. Mengetahui bahwa mahasiswa juga bisa berperan penting dalam menyulut demonstrasi, Putin juga mengusahakan sebuah cara untuk mengikat pemuda-pemudi lebih dekat dengan rezim melalui pembentukan Nashi, sebuah gerakan pemuda pro-Putin yang dapat menikmati berbagai keuntungan dibawah naungan pemerintah atas hubungan dekat antar keduanya (Ishkanian, 2007).

Selama empat tahun pertama masa kepresidenannya, Putin mengadopsi pendekatan yang pragmatis dengan tetap mengusahakan kerja sama dengan AS dan negara-negara Barat. Namun, peristiwa *Orange Revolution* mengubah secara total

pendekatan tersebut dan pandangan Putin terhadap Barat. Bagi Rusia, dukungan Barat terhadap protes-protes pro-demokrasi di Ukraina adalah sebuah agresi internasional yang sekaligus merupakan upaya untuk mengancam stabilitas Rusia (Bugayova, 2019). Mulai tahun 2004, orientasi politik luar negeri Rusia dibawah Putin mencerminkan antagonisme dan sikap konfrontatif terhadap Barat dimana Putin mulai secara terbuka menyebarkan narasi Amerika Serikat dan NATO yang mengancam kedaulatan Rusia dengan melakukan ekspansi militer ke berbagai forum nasional maupun internasional. Pada Konferensi Keamanan Internasional di München tahun 2007, Putin menyatakan bahwa “proses ekspansi NATO tidak ada korelasinya dengan modernisasi dari aliansi tersebut” dan bahwa “Amerika Serikat telah melangkahi batas-batas nasionalnya dalam segala hal” (President of Russia, 2007).

Di tahun 2008, Presiden Viktor Yushchenko mengutarakan intensinya untuk mengintegrasikan Ukraina ke NATO dimana pada waktu itu Ukraina dan Georgia sedang dalam proses negosiasi dengan NATO untuk memberi mereka *Membership Action Plan* (MAP) (Lowe, 2008). Menurut Yushchenko, integrasi Ukraina dalam NATO tidak hanya sebatas keinginan yang ingin direalisasi tetapi juga membuktikan bahwa Ukraina tidak akan kembali mencari perlindungan dan berada dibawah bayang-bayang seperti dahulu lagi, tetapi berani untuk menentukan arah serta tujuannya sendiri menuju integrasi di Eropa (Atlantic Council, 2008). Rusia merespon hal tersebut dengan geram; Presiden Medvedev mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times bahwa “Kami tidak puas dengan situasi di Georgia dan Ukraina. Kami yakin hal ini sangat bermasalah bagi arsitektur

keamanan Eropa yang ada. Tidak ada negara yang akan senang jika ada perwakilan dari blok militer yang negaranya bukan anggotanya tiba di perbatasannya.” (Medvedev, 2008).

Diantara tahun-tahun yang merepresentasikan dinamika hubungan Rusia dan Ukraina, tahun 2014 paling mencerminkan banyak tantangan dan konflik. Di bulan April, terjadi pemberontakan dari kaum-kaum separatis di wilayah Donbas (Ukraina Timur) yang diduga disponsori oleh Rusia. Perang pecah pada setelah pemberontak yang didukung Rusia merebut gedung-gedung pemerintah di kota-kota di seluruh Ukraina Timur. Pertempuran sengit membuat sebagian Luhansk dan Donetsk, di wilayah Donbas, berada di tangan separatis yang didukung Rusia. Daerah yang dikuasai separatis di Donbas dikenal sebagai Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Pemerintah Ukraina di Kyiv menegaskan kedua wilayah tersebut pada dasarnya diduduki Rusia. Republik yang dideklarasikan sendiri tidak diakui oleh pemerintah mana pun, selain Rusia dan sekutu dekatnya Suriah. Bahasa di sekitar konflik juga sangat dipolitisasi dimana pemerintah Ukraina menyebut pasukan separatis sebagai “penjajah”, sedangkan media-media Rusia menyebut pasukan separatis tersebut sebagai “milisi” yang merupakan penduduk setempat yang membela diri melawan pemerintah Kyiv. Lebih dari 14.000 orang telah tewas dalam konflik di Donbas sejak 2014. Pemerintah Ukraina menyatakan sekitar 1,5 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dimana sebagian besar tinggal di daerah Donbas yang masih berada di bawah kendali Ukraina dan sekitar 200.000 dimukimkan kembali di wilayah Kyiv yang lebih luas. Rusia telah lama menyatakan bahwa tidak ada tentara di sana, tetapi AS, NATO dan Ukraina

mengatakan bahwa pemerintah Rusia memasok separatis, memberi mereka dukungan penasihat dan intelijen, dan menempatkan perwira mereka sendiri di barisan mereka. Rusia juga diduga telah membagikan ratusan ribu paspor Rusia kepada orang-orang di Donbas dalam beberapa tahun terakhir (Qiblawi, Hodge, Lister, & Kottasová, 2022).

Amerika Serikat dan negara-negara Barat menuduh Putin berusaha untuk menetapkan fakta di lapangan dengan menaturalisasi Ukraina sebagai warga negara Rusia yang akan memberinya alasan untuk campur tangan di Ukraina. Dalam beberapa minggu terakhir, Putin menuduh bahwa "genosida" sedang dilakukan di Donbas. Tuduhannya bukanlah hal baru, tetapi ketepatan waktu antara klaim Putin dengan aksi-aksi yang dilakukan Rusia di Donbas menjadi perhatian negara-negara Barat yang khawatir akan terulangnya konflik 2008 di Georgia. Dengan menyerukan genosida, Putin menggemakan klaim palsu Rusia bahwa Georgia melakukan genosida terhadap warga sipil di republik Ossetia Selatan yang memisahkan diri pada Agustus 2008. Selama konflik singkat itu, Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran yang mendorong jauh ke dalam wilayah Georgia. Seperti pada tahun 2014, wilayah Donbas sekarang menjadi wadah konflik antara Timur dan Barat, antara dorongan Putin untuk menegaskan kembali kontrol – melemahkan negara Ukraina – dan aspirasi yang berkembang dari Ukraina untuk bergabung dengan demokrasi Eropa.

Juga pada tahun 2014, Rusia menganeksasi Krimea, yang telah menjadi bagian dari Ukraina sejak 1954. Semenanjung Krimea berada di atas Laut Hitam dan merupakan rumah bagi sekitar 2,5 juta orang. Krimea pertama kali menjadi

bagian dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1768 dimana setelah melewati berbagai perebutan teritori, Krimea menjadi bagian dari Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (RSFS Rusia) yang kemudian diserap oleh Uni Soviet. Krimea tetap menjadi wilayah kekuasaan Uni Soviet hingga tahun 1954 sebelum akhirnya pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, menghadiahkan Krimea ke Ukraina sebagai bagian dari program de-Stalinisasinya. Kesepakatan itu dibuat dengan dalih bahwa Krimea selamanya akan tetap menjadi bagian dari Uni Soviet, tetapi permasalahan mulai muncul ketika negara komunis tersebut dibubarkan pada tahun 1991. *The Revolution of Dignity*, yang juga dikenal sebagai Revolusi Maidan, meletus akibat penolakan Presiden Yanukovych untuk menandatangani dokumen yang akan menciptakan asosiasi politik dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Peristiwa tersebut menyebabkan 130 orang tewas, termasuk 18 petugas polisi, dan revolusi menyebabkan pemilihan presiden lebih awal.

Pemerintah Ukraina yang saat itu dipenuhi oleh pejabat-pejabat pro-Rusia tidak bisa menekan ketidakpuasan rakyat sehingga pada 22 Februari 2014, Presiden Yanukovych melarikan diri ke Rusia untuk mencari perlindungan. Dengan dalih menyelamatkan sekutunya, Putin memerintahkan operasi militer ke Krimea dan memulai kudeta militer. Pada 27 Februari, angkatan bersenjata Rusia merebut gedung Dewan Tertinggi Krimea dan gedung Dewan Menteri di Simferopol. Komunitas internasional dengan sangat keras menentang aksi Rusia ini; AS dan Uni Eropa mendesak Rusia untuk mundur dengan memberlakukan berbagai sanksi terhadap negara tersebut. Selama Paralimpiade Musim Dingin 2014 yang diadakan di Rusia Sochi, Amerika Serikat menolak untuk mengirim delegasi Presiden; David

Cameron dan Angela Merkel juga menolak hadir meski ketiga negara mengirimkan tim untuk bertanding. Pada 24 Maret 2014, anggota G7 membatalkan KTT G8 yang direncanakan yang akan diadakan pada bulan Juni tahun itu di kota Sochi dan memberhentikan sementara keanggotaan Rusia dengan grup tersebut. Walaupun demikian, hingga saat ini Rusia tetap menguasai Krimea meskipun diberi kecaman yang keras oleh komunitas internasional dan kepemilikan tersebut tidak diakui secara internasional.

Dengan ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara, Protokol Minsk telah menjadi faktor kunci dalam diskusi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik di Ukraina Timur. Protokol Minsk I ditandatangani oleh Ukraina, Rusia, dan *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), dan para pemimpin kaum separatis pro-Rusia pada September 2014. Melalui protokol tersebut, Ukraina dan Rusia menyetujui diadakannya gencatan senjata yang terdiri dari dua belas poin kesepakatan (termasuk penarikan senjata berat dan pertukaran tahanan). Namun, Protokol Minsk I gagal menghentikan pertempuran dengan kedua pihak yang terus melakukan pelanggaran. Karena situasi tidak membaik, lima bulan kemudian Prancis dan Jerman memediasi Rusia dan Ukraina untuk melakukan diskusi kembali dan pada akhirnya melahirkan Protokol Minsk II. Akan tetapi, Protokol Minsk II juga tidak membuahkan hasil dimana OSCE melaporkan sekitar 200 pelanggaran selama periode 2016 – 2020. Seiring terus berjalannya pertempuran di Donbas, Rusia berulang kali menyerang Ukraina dalam serangkaian serangan dunia maya, termasuk serangan tahun 2016 terhadap jaringan listrik Ukraina yang menyebabkan pemadaman listrik besar-

besaran. Pertempuran di Donbas dan aneksasi Krimea di tahun 2014 memupuk sentimen buruk Ukraina terhadap Rusia sehingga semakin membangkitkan keinginan Ukraina untuk melakukan integrasi dengan NATO dan Uni Eropa.

2.3 Operasi Militer Khusus Rusia di Ukraina Tahun 2022

Relasi buruk tersebut pada akhirnya terus bertahan hingga Presiden Vladimir Putin menetapkan kebijakan operasi militer khusus di Ukraina pada tahun 2022. Berminggu-minggu diplomasi intens dan pengenaan sanksi Barat terhadap Rusia gagal menghalangi Putin, yang telah mengumpulkan antara 150.000 dan 200.000 tentara di sepanjang perbatasan Ukraina. Berangkat dari situasi yang terjadi di Donetsk dan Luhansk sejak tahun 2014, pada tanggal 24 Februari 2022 Putin mengerahkan pasukannya untuk melakukan operasi militer khusus Ukraina dengan klaim melakukan demiliterisasi dan denazifikasi untuk “menyelamatkan orang-orang Rusia yang mengalami genosida serta penyiksaan di wilayah tersebut oleh pemerintah Ukraina selama delapan tahun” (Putin, 2022). Setelah berbulan-bulan mengumpulkan puluhan ribu pasukan di dekat perbatasan Ukraina dan serangkaian pembicaraan diplomatik yang gagal, Putin menginstruksikan pasukan militernya untuk memasuki wilayah Ukraina (BBC, 2022).

Segera setelah Putin mengumumkan secara resmi terkait “operasi militer” tersebut, laporan mengenai ledakan-ledakan bom di Ukraina mulai bermunculan bersamaan dengan tank-tank Rusia yang memasuki Ukraina dari sisi Utara, Timur, dan Selatan (CNN, 2022). Pemerintah Rusia menargetkan infrastruktur-infrastruktur penting seperti bandara dengan serangan udara dan telah meluncurkan

lebih dari 400 rudal per 1 Maret 2022. Garis depan pertempuran utama berada di pinggiran Kyiv; di selatan Ukraina, termasuk kota besar Mariupol; dan di timur Ukraina di sekitar Kharkiv dimana tentara-tentara Rusia berusaha mengepung kota-kota besar dari semua sisi untuk memaksa tentara-tentara Ukraina menyerah. Dari situ, serangan-serangan rudal dan bom terhadap infrastruktur militer dan sipil Ukraina-pun dimulai. Namun demikian, memasuki minggu ke-2 peperangan, perang terjadi berlarut-larut tanpa adanya satu pihak yang mendominasi. Berhasil memberikan perlawanan yang ketat terhadap tentara-tentara Rusia, Ukraina berhasil memukul mundur pasukan militer Rusia di beberapa kota dan mencegah direbutnya kota-kota penting seperti Chernihiv dan Kharkiv yang memungkinkan pasukan Ukraina untuk bermanuver di pedesaan dan memanfaatkan bala bantuan (Kusa, 2022).

Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), operasi militer khusus Rusia ke Ukraina menyebabkan sebanyak sepuluh juta orang, atau sekitar seperempat dari populasi Ukraina terpaksa meninggalkan tempat tinggal untuk mengungsi. Dari jumlah tersebut, hampir empat juta telah mencari suaka ke negara-negara tetangga, termasuk Hungaria, Moldova, Rumania, dan Polandia. Pada bulan Maret 2022, PBB mencatat setidaknya 902 warga sipil tewas dan 1.459 mengalami luka-luka. Merespon hal ini, banyak negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, dan Selandia Baru melimpahkan berbagai sanksi, mulai dari larangan ekspor impor, mengeluarkan Rusia dari sistem perbankan SWIFT, hingga larangan bepergian dan pembekuan aset sejumlah elit pemerintahan: Pemerintah Australia memberikan

sanksi kepada delapan anggota Dewan Keamanan Rusia dan beberapa bank Rusia serta membatasi perdagangan dengan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk pada tanggal 23 Februari. Pemerintah Kanada memberikan sanksi kepada dua bank Rusia, melarang warga Kanada membeli surat hutang/obligasi dari Rusia, dan memberikan sanksi kepada Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk pada 22 Februari. Pemerintah Jepang membekukan aset politisi Rusia yang terlibat dalam pengakuan wilayah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk dan melarang penjualan obligasi Rusia di Jepang pada 23 Februari. Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan pejabat senior Rusia lainnya serta Badan Riset Internet Rusia pada 23 Februari (Institute for the Study of War, 2022).

Terdapat sejumlah klaim berbeda terkait latar belakang operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina dimana Putin menyatakan kebijakan tersebut sebagai “operasi militer khusus” dalam pidatonya, sedangkan negara-negara lain menyatakannya sebagai “invasi”. Narasi tersebut terus digaungkan Putin melalui media-media massa Rusia yang menyangkal kedaulatan Ukraina serta agresi-agresi yang terjadi di negara tersebut terhadap warga negara sipil di Donbas dan Luhansk untuk menjustifikasi kebijakan operasi militer khususnya (Kagan, Clark, Barros, & Stepanenko, 2022). Terkait narasi denazifikasi dan demiliterisasi yang dibawa Putin sebagai justifikasi melakukan operasi militer khusus, komunitas internasional tidak mempercayai pernyataan tersebut dan sebagai gantinya menyatakan bahwa Rusia telah melanggar kedaulatan Ukraina. Dalam pidato tersebut Putin juga terus menyatakan kegeramannya terhadap Amerika Serikat dan NATO, bahwa yang

mereka lakukan selama ini di Ukraina adalah sebuah “*campaign of terror*” untuk membangun narasi anti-Rusia (Putin, 2022). Menurut Putin, keputusannya untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina adalah sebuah keharusan demi mempertahankan kedaulatan Rusia: “...*And for our country, this is ultimately a matter of life and death, a matter of our historical future as a people. This is a real threat not just to our interests, but to the very existence of our state, its sovereignty. This is the very red line that has been talked about many times. They passed her*” (Vladimir Putin, 2022). Berangkat dari pandangan itulah Putin kemudian memberikan sejumlah tuntutan pada Ukraina untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, yaitu: mengakui Krimea yang telah menjadi wilayah kedaulatan Rusia; mengurungkan seluruh niat dan aspirasi untuk bergabung dalam NATO; melakukan negosiasi secara damai dengan Republik Donetsk dan Luhansk untuk menyatakan kemerdekaan mereka, dan; melakukan demiliterisasi dengan menanggalkan seluruh persenjataan yang dapat mengancam Rusia termasuk segala niatan untuk mengembangkan senjata nuklir (Clark & Kagan, 2022).

Satu tahun kemudian, peperangan masih berlangsung dan krisis kemanusiaan terus berlanjut: jutaan warga terkena dampaknya dan terpaksa kehilangan rumah-rumah mereka; fasilitas umum, gedung sekolah, dan berbagai infrastruktur penting lainnya hancur. Walaupun pada awal operasi militer khusus tentara-tentara Rusia bergerak dengan cepat dan sigap untuk merebut kota-kota penting di Ukraina, kenyataan yang terjadi saat ini adalah pasukan Ukraina memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan Rusia dan berhasil memukul mundur mereka di banyak wilayah dengan dukungan AS dan banyak negara Eropa;

tentara-tentara Ukraina bahkan telah mengambil kembali kendali atas kota Kherson yang sebelumnya berhasil direbut tentara Rusia (BBC, 2022). Pada Februari 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Kyiv dan menyatakan dukungan penuhnya untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Ukraina. Dalam kunjungan tersebut, Biden mengatakan bahwa AS akan memberikan bantuan militer ke Ukraina senilai \$500 juta dolar. Tak hanya mendapat bantuan dari AS, Ukraina juga mendapatkan bantuan militer dari Inggris yang diperkirakan senilai £2,3 miliar menjadi negara penyumbang militer terbesar kedua setelah AS (BBC, 2023). Pada Februari 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Kyiv dan menyatakan dukungan penuhnya untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Ukraina. Dalam kunjungan tersebut, Biden mengatakan bahwa AS akan memberikan bantuan militer ke Ukraina senilai \$500 juta dolar. Tidak hanya mendapat bantuan dari AS, Ukraina juga mendapatkan bantuan militer dari Inggris yang diperkirakan bernilai £2,3 miliar menjadikan negara itu donor militer terbesar kedua setelah AS (BBC, 2023).